

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Sebagai dasar untuk melengkapi landasan teori, berikut ini disajikan beberapa hasil penelitian terdahulu.

Mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Maretha dan Purwaningsih (2013) dengan judul Pengaruh Penerapan *Good corporate governance* terhadap Kinerja Perusahaan, dengan Komposisi Aset dan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Kontrol. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Good corporate governance* terhadap kinerja perusahaan. Variabel independen dalam penelitian ini adalah GCG yang diproksikan dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh IICG berupa *Corporate Governance Perception Index* (CGPI). Sedangkan variabel dependen adalah kinerja perusahaan yang diproksikan dengan ROE. Sementara itu, variabel kontrol penelitian ini adalah komposisi aset tetap (*asset*) dan ukuran perusahaan (*size*). Penelitian ini menggunakan sampel dari beberapa perusahaan yang terdaftar di BEI dan CGPI dengan populasi perusahaan yang terdaftar di BEI dan CGPI pada periode 2007-2011. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis uji regresi (*parametric*). Dalam analisis regresi (*parametric*) ini, dilakukan uji normalitas data dan uji asumsi klasik. Uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Sementara itu uji asumsi klasik meliputi, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *good corporate governance* (GCG) berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, yang diproksikan dengan ROE. Penelitian ini memasukkan variabel kontrol untuk mengakui bahwa GCG mempunyai keterikatan dengan beberapa faktor, yaitu komposisi aset (*asset*) dan ukuran perusahaan (*size*). Hasil pengujian menunjukkan bahwa komposisi aset dan *size* berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Perusahaan yang memiliki komposisi aset tetap yang tinggi dan ukuran perusahaan yang besar akan mendorong perusahaan untuk meningkatkan penerapan GCG agar kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan secara efektif serta terhindar dari praktik korporasi yang merugikan. Dengan demikian, kinerja perusahaan akan semakin meningkat.

Arifani (2013) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh *Good corporate governance* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Good corporate governance* terhadap Kinerja Keuangan. Indikator *Good corporate governance* yang digunakan adalah komite audit, komisaris independen, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *good corporate governance* dan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan yang diukur dengan ROE. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2011. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear. Dalam analisis regresi linier ini, dilakukan uji

asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas, serta pengujian hipotesis secara statistik.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa komite audit mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan dibentuknya komite audit mampu untuk mengawasi manajemen dalam meningkatkan kinerja keuangannya. Kepemilikan institusional juga mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan. Hasil ini menunjukkan bahwa kepemilikan saham oleh institusi diluar perusahaan mampu menjadi kontroler dalam pengambilan keputusan oleh manajemen sehingga tercipta kinerja keuangan yang baik. Demikian halnya dengan adanya komisaris independen yang terbukti memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Dengan ditunjuknya komisaris independen pada RUPS, akan secara langsung memberikan pengawasan terhadap direksi dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan. Hasil penelitian tidak dapat membuktikan bahwa kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Kepemilikan manajerial yang minoritas tidak dapat mempengaruhi peningkatan kinerja keuangan karena pengambilan keputusan manajemen dalam rangka untuk meningkatkan kinerja keuangan masih dipengaruhi oleh pemegang saham yang lebih besar.

Oktafian dan Putra (2016) melakukan penelitian mengenai Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Return on Equity* pada Perusahaan yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh *corporate governance* terhadap *return on equity*. Sampel dalam penelitian ini adalah sebesar 14 perusahaan *Go Public* yang menduduki peringkat CGPI tahun

2010–2012. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling*. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda, uji t, uji F. Metode analisis yang digunakan meliputi analisis regresi berganda, uji t dan uji F, dan Uji Determinasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan *corporate governance* berpengaruh secara simultan terhadap *return on equity*. Hal ini dibuktikan dari pengujian statistik diperoleh hasil bahwa bahwa F hitung lebih besar daripada F tabel ($3,009 > 2,858$) dan signifikan pada $0,030 < 0,050$ dan hanya ada 1 variabel kontrol yang secara parsial mempengaruhi *return on equity*. Hal ini dibuktikan dari pengujian secara statistik signifikan sebesar $0,046 (< 0,05)$ dan t hitung $>$ daripada t tabel ($2,067 > 2,026$) Hal ini berarti aktiva perusahaan sebagai variabel kontrol berpengaruh secara signifikan terhadap *Return on Equity* sebagai variabel dependennya.

Sulasmiyati, dkk. (2016) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Mekanisme *Good corporate governance* terhadap Profitabilitas Perusahaan. Penelitian ini menyoroti mengenai pengaruh mekanisme *Good corporate governance* (GCG) terhadap profitabilitas industri makanan dan minuman di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah *explanatory research* dengan pendekatan kuantitatif. Mekanisme GCG yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dewan komisaris independen, direksi, dan kepemilikan institusional. Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan tingkat *Return on Equity* (ROE). Penelitian ini menggunakan data sekunder perusahaan makanan dan minuman tahun 2011-2014 yang diperoleh melalui website resmi Bursa Efek Indonesia (BEI). Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi

linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dewan komisaris independen, direksi, dan kepemilikan institusional secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ROE. Secara parsial, Dewan Direksi memiliki pengaruh signifikan terhadap ROE. Di sisi lain, koefisien regresi menunjukkan bahwa dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional memiliki nilai positif tetapi tidak signifikan terhadap ROE.

Puniyasa dan Triaryati (2016) melakukan penelitian mengenai Pengaruh *Good corporate governance*, Struktur Kepemilikan dan Modal Intelektual Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan yang Masuk dalam Indeks CGPI. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance*, struktur kepemilikan institusional, struktur kepemilikan manajerial dan modal intelektual terhadap kinerja keuangan perusahaan. Variabel independen yang digunakan adalah mekanisme *good corporate governance* yang diukur dengan struktur kepemilikan institusional, struktur kepemilikan manajerial, dan modal intelektual. Variabel dependen yang digunakan adalah kinerja perusahaan yang diukur dengan ROE. Populasi dalam penelitian ini adalah 49 perusahaan yang masuk dalam indeks CGPI selama 2012-2014. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dan sampel akhir yang didapatkan adalah 10 perusahaan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda.

Hasil dari penelitian tersebut adalah *Good corporate governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROE). Hal ini

disebabkan karena penerapan *Good corporate governance* bersifat jangka panjang sehingga akan sulit diukur dengan jangka waktu yang pendek menggunakan ROE. Kurang konsistennya perusahaan yang ikut serta dalam survey CGPI juga menyebabkan kurang jelasnya pengaruh antara CGPI terhadap ROE. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROE). Hal ini dilatarbelakangi oleh kepemilikan institusional memiliki risiko yang tinggi. Risiko yang tinggi ini timbul sebagai akibat dari penempatan sejumlah dana yang besar pada perusahaan yang bersangkutan, sehingga pemilik institusi cenderung bertindak demi kepentingannya saja. Kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROE). Hal ini disebabkan kepemilikan manajerial dapat menyatukan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham, sehingga kinerja keuangan perusahaan semakin baik. Modal intelektual berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROE). Hal ini disebabkan Adanya efisiensi dalam penerapan modal intelektual mampu menciptakan produktivitas yang tinggi bagi para pegawai. Produktivitas inilah yang akan mampu membawa perusahaan untuk mencapai kinerja keuangan yang lebih baik lagi.

Heriyanto dan Mas'ud (2016) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh *Good corporate governance* terhadap Profitabilitas Perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Good corporate governance* (GCG) terhadap profitabilitas perusahaan. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *Good corporate governance* (GCG) dengan proksi ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, dan ukuran komite audit. Sedangkan variabel

dependen dalam penelitian ini adalah profitabilitas perusahaan yang diproksikan dengan ROE. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2012-2014. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Dalam analisis regresi ini, dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas.

Hasil dari penelitian ini adalah pengaruh ukuran Dewan Komisaris terbukti positif signifikan terhadap ROE. Hal ini dapat dilihat dari tingkat signifikansi sebesar 0,047 ($<0,05$). Pengaruh ukuran dewan direksi terbukti positif signifikan terhadap ROE. Dapat dilihat dari tingkat signifikansinya sebesar 0,048 ($<0,05$). Pengaruh ukuran komite audit (yang diukur melalui rata-rata tingkat kehadiran anggota dalam rapat komite audit) tidak signifikan terhadap ROE. Terlihat dari tingkat signifikansinya sebesar 0,323 ($>0,05$).

2.2 Landasan Teori

2.2.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan merupakan teori yang mempelajari segala aspek mengenai *stakeholder* atau *shareholder* yang ada dalam perusahaan yang dapat menciptakan potensi konflik kepentingan. Dalam rangka memahami *good corporate governance* maka dasar perspektif digunakan dalam hubungan keagenan, Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (*agen*) dengan investor (*principal*). Hubungan antara

principal dan *agen* dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan informasi (*asymmetrical information*) karena disini *agen* berada pada posisi yang memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan *principal*. Pada keadaan tersebut, akan mendorong *agen* untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui *principal*. Sehingga *agen* dapat mempengaruhi angka-angka akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan. Kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen dalam rangka memperoleh keuntungan pribadi dapat mengganggu aktivitas perusahaan dan profitabilitas perusahaan secara keseluruhan. Perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen inilah disebut dengan *Agency Problem*.

Dengan adanya masalah agensi yang disebabkan karena ketidakseimbangan informasi yang didapat, maka perusahaan harus menanggung biaya keagenan (*agency cost*). Teori keagenan memerlukan pengawasan khusus, yaitu dengan mekanisme *good corporate governance*, yang merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang diharapkan dapat memberikan kepercayaan terhadap manajemen dalam mengelola kekayaan pemegang saham, sehingga dapat meminimalkan konflik kepentingan dan meminimalisir biaya keagenan. Dengan demikian *good corporate governance* diharapkan dapat digunakan sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang mereka investasikan.

2.2.2. Teori Nilai Pemegang Saham (*Shareholder Value Theory*)

Pemegang saham (*Shareholder*) adalah seseorang ataupun badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham dalam perusahaan. Dalam *Shareholder value theory*, menyatakan bahwa tanggung jawab yang paling mendasar dari direksi adalah dengan bertindak untuk kepentingan meningkatkan nilai dari pemegang saham, sehingga berjalannya pengurusan oleh direksi harus mempertimbangkan kepentingan pemegang sahamnya untuk memastikan kesehatan perusahaan dalam jangka panjang termasuk peningkatan nilai (*value*) yang didapat pemegang sahamnya (Sulasmiyati, dkk., 2016).

Pengungkapan informasi yang berdasarkan prinsip-prinsip yang baik dalam mengelola perusahaan adalah suatu keinginan yang ingin dicapai oleh pemegang saham (*Shareholders*). Karena itu merupakan hak yang dimiliki oleh para pemegang saham (*Shareholders*).

2.2.3. Teori *Stakeholder*

Tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimalkan kemakmuran pemiliknya. *Stakeholders* adalah semua pihak internal atau eksternal yang memiliki hubungan baik secara maupun secara tidak langsung dengan perusahaan. Oleh karena itu perusahaan harus memperhatikan *stakeholders*, karena mereka merupakan pihak yang mempengaruhi dan dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung atas aktivitas serta kebijakan yang diambil dan dilakukan perusahaan. Yang termasuk *stakeholders* adalah pemegang saham, para kreditor,

pekerja/karyawan, pelanggan, pemasok, masyarakat, serta lingkungan sekitar maupun lingkungan luas.

Teori *stakeholder* memiliki suatu hubungan dengan *good corporate governance* dimana *stakeholder* sebagai pihak yang mempengaruhi dan/atau dipengaruhi dalam pengelolaan perusahaan serta pencapaian tujuan perusahaan. Perusahaan harus selalu melibatkan *stakeholder* dalam setiap kebijakan maupun pengambilan keputusan, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perusahaan harus melaksanakan tata kelola perusahaan dengan baik. (Sulasmiyati, dkk., 2016).

2.2.4. Good Corporate Governance

Menurut Turnbull Report di Inggris (1999) dikutip oleh Efendi (2009), tata kelola perusahaan (*Good corporate governance*) adalah suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang bertujuan untuk mengelola risiko untuk memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan asset perusahaan dan juga meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. Dengan demikian maka *good corporate governance* (GCG) adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *shareholder* khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan untuk mengatur kewenangan direktur, manajer, pemegang saham dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu.

Dengan implementasi GCG, maka pengelolaan sumber daya perusahaan diharapkan menjadi efisien, efektif, ekonomis dan produktif dengan selalu berorientasi pada tujuan perusahaan dan memperhatikan *stakeholders approach*.

Pedoman Umum GCG yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada tahun 2006, adapun prinsip-prinsip yang mendasari terbitnya pedoman tersebut, antara lain :

a. Transparansi

Di sini para pengelola perusahaan harus berbuat secara transparan kepada penanam saham, jujur apa adanya dalam membuat laporan usaha, tidak manipulatif. Keterbukaan informasi dalam proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi yang dianggap penting dan relevan.

b. Akuntabilitas

Yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban dalam perusahaan, sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar sesuai dengan standar berlaku. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

c. Responsibilitas

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga

dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

d. Independensi

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

e. Kewajaran dan Kesetaraan

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Untuk mewujudkan terciptanya GCG, prinsip-prinsip tersebut harus ditanamkan pada perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, dan dengan kerjasama yang baik dari berbagai pihak.

Selain menanamkan prinsip-prinsip GCG dalam aktivitas bisnisnya, perusahaan juga harus memiliki mekanisme *good corporate governance* dengan baik. Mekanisme *good corporate governance* merupakan seperangkat tata cara, prosedur, atau aturan main yang jelas antar berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan praktik tata kelola perusahaan atau antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol atau pengawasan terhadap keputusan (Anyta,2011).

Ada beberapa mekanisme *good corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kinerja keuangan, diantaranya adalah komposisi dewan komisaris independen, komite audit

independen, ukuran dewan direksi, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial.

2.2.4.1. Komposisi Dewan Komisaris Independen

Wardhani (2008) menyatakan bahwa *board governance* terdiri dari komisaris independen, komite audit, dan sekretaris perusahaan bahwa untuk mencapai *good corporate governance*, jumlah komisaris independen yang harus terdapat dalam perusahaan sekurang-kurangnya 30% dari seluruh anggota dewan komisaris.

Komisaris Nasional *Good corporate governance* (KNGCG) menjelaskan tentang adanya komisaris independen yang ada di perusahaan publik. Dalam pedoman yang terdapat di KNGCG menyebutkan bahwa komisaris bertanggung jawab dan juga berwenang untuk mengawasi kebijakan dan tindakan direksi serta memberikan nasihat kepada direksi, jika diperlukan. Komisaris independen adalah anggota komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis dan hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau semata-mata demi kepentingan perusahaan.

Keberadaan dewan komisaris independen sangatlah penting, karena dalam kondisi riil sering ditemukan banyak transaksi yang melenceng dari kepentingan perusahaan yang dapat merugikan *stakeholders*. Dengan adanya komisaris independen diharapkan dapat menunjang penerapan *good corporate governance* pada suatu perusahaan, dengan melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada para dewan direksi secara efektif sehingga dapat memberikan nilai

tambah bagi perusahaan. Posisi komisaris independen dalam perusahaan juga sebagai ketua komite audit dan komite nominasi.

2.2.4.2. Komite Audit

Sesuai dengan Kep.29/PM/2004, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Selain itu komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen untuk mengatasi masalah pengendalian ataupun kemungkinan timbulnya agensi.

Dengan adanya komite audit diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan, meningkatkan efektivitas fungsi internal audit maupun eksternal audit, serta dapat mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris.

Seperti diatur dalam Kep-29/PM/2004 merupakan peraturan yang mewajibkan perusahaan membentuk komite audit, tugas komite audit antara lain:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal.

4. Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi.
5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada dewan komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten.
6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan rahasia perusahaan.

Komite audit akan bertanggung jawab langsung kepada dewan komisaris, dengan demikian apabila fungsi dan tanggung jawab komite audit dapat dilaksanakan dengan baik, maka hal ini akan mendorong terwujudnya prinsip-prinsip GCG yang akan mendorong perusahaan untuk selalu bertanggung jawab kepada kepentingan seluruh stakeholders.

2.2.4.3. Ukuran Dewan Direksi

Zarkasyi (2008) dalam Sulasmiyati, dkk. (2016) menyatakan bahwa Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab, penuh, atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan. Dewan Direksi bertugas dan bertanggung jawab dalam mengelola perusahaan dan dituntut untuk dapat melaksanakan tugasnya serta mampu mengambil keputusan sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

Jumlah dewan direksi telah diatur dalam UUD RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 92 ayat 3 dan 4, yang menyatakan bahwa jumlah direksi pada perseroan terdiri atas 1 anggota, namun untuk perusahaan yang berkaitan dengan menghimpun/mengelola dana maka jumlah direksi minimal 2

orang anggota. Dalam menjalankan perseroan direksi memiliki tugas-tugas, diantaranya:

- a. Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengurusan Perseroan dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan dengan aktivitas Perseroan.
- b. Direksi wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dan memastikan seluruh aktivitas Perseroan telah sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, keputusan RUPS serta peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Perseroan.
- c. Direksi dalam memimpin dan mengurus Perseroan semata-mata hanya untuk kepentingan dan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja perusahaan.
- d. Direksi senantiasa memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan secara amanah dan transparan. Untuk itu direksi mengembangkan sistem pengendalian internal dan sistem manajemen resiko secara terstruktur dan komprehensif.
- e. Direksi akan menghindari kondisi dimana tugas dan kepentingan perseroan berbenturan dengan kepentingan pribadi.

2.2.4.4. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan institusional dapat meningkatkan pengawasan yang lebih optimal. Dengan adanya pengawasan tersebut akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal (Arifani, 2013).

Adanya kepemilikan institusional dapat memantau secara profesional perkembangan investasinya sehingga tingkat pengendalian terhadap manajemen sangat tinggi yang pada akhirnya dapat menekan potensi kecurangan. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegah terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen (Faizal, 2004).

Dengan adanya pengawasan yang semakin ketat terhadap manajemen hendaknya tanggung jawab manajemen dalam mengelola dan mengembangkan perusahaan juga semakin meningkat, yang diharapkan kinerja yang dicapai perusahaan akan lebih maksimal sehingga nilai pengembalian yang didapat oleh pemegang saham institusional juga akan lebih tinggi.

2.2.4.5. Kepemilikan Manajerial

Menurut Melinda (2008) kepemilikan manajerial adalah persentase suara yang berkaitan dengan saham dan *option* yang dimiliki oleh manajer dan komisaris suatu perusahaan.

Kepemilikan manajerial sebagai salah satu cara untuk mengurangi masalah keagenan, hal ini dikarenakan kepemilikan manajerial merupakan alat pengawasan terhadap kinerja manajer yang bersifat internal. Semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka manajemen akan lebih giat untuk meningkatkan kinerjanya, karena manajemen mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi keinginan dari pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri dengan mengurangi risiko keuangan perusahaan melalui penurunan tingkat hutang.

Jehsen dan Meckling (1976) menganalisis bagaimana kinerja perusahaan dipengaruhi oleh distribusi kepemilikan antara pihak manajer yang menikmati manfaat dan pihak luar yang tidak menikmati manfaat. Peningkatan kepemilikan manajerial akan mengurangi *agency difficulties* melalui pengurangan insentif untuk mengkonsumsi manfaat dan mengambil alih kekayaan pemegang saham/investor.

2.2.5. Kinerja Perusahaan

Pengukuran kinerja perusahaan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengukuran kinerja non keuangan (*non financial performance measurement*) dan pengukuran kinerja keuangan (*financial performance measurement*). Informasi

yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan adalah informasi keuangan (*financial information*). Pengukuran kinerja perusahaan dilakukan untuk melakukan perbaikan dan pengendalian atas kegiatan operasional perusahaan agar dapat bersaing dengan perusahaan lain, serta untuk menetapkan strategi yang tepat dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.

Rafriny (2012) mengklasifikasikan beberapa manfaat penilaian kinerja perusahaan, diantaranya :

- a. Untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya.
- b. Selain digunakan untuk melihat kinerja organisasi secara keseluruhan, maka pengukuran kinerja juga dapat digunakan untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan.
- c. Dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang.
- d. Memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya.
- e. Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan.

Dengan adanya pengukuran kinerja maka perusahaan diharapkan mampu bertahan dan mengikuti persaingan dan perkembangan yang ada. Sistem pengukuran kinerja dalam penelitian ini berfokus pada kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan merupakan suatu gambaran tentang

kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu (Arifani, 2013).

Ukuran kinerja keuangan perusahaan yang dipakai menggunakan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas menjadi alat ukur efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya yang ada dalam proses operasional perusahaan bagi perusahaan yang akan menanamkan modalnya.

Rasio Profitabilitas dalam penelitian ini adalah *Return on Equity* (ROE). ROE membandingkan laba bersih setelah pajak dengan ekuitas yang telah diinvestasikan pemegang saham perusahaan (Van Horne, dkk. 2005). Rasio ini menunjukkan daya untuk menghasilkan laba atas investasi berdasarkan nilai buku para pemegang saham, dan sering kali digunakan dalam membandingkan dua atau lebih perusahaan atas peluang investasi yang baik dan manajemen biaya yang efektif.

Rasio ini merupakan salah satu indikator penting yang selalu digunakan oleh investor untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan sebelum melakukan investasi karena yang menjadi daya tarik utama bagi pemilik perusahaan pemegang saham dalam suatu perusahaan adalah profitabilitas. Pemilik akan tertarik pada laba yang merupakan haknya, seberapa banyak yang diinvestasikan kembali dan seberapa banyak yang dibayarkan sebagai deviden kepada mereka dan pemilik juga berkepentingan dengan dampak hasil perusahaan terhadap nilai perusahaan investasi mereka, khususnya jika saham dijual kepada umum.

Sedangkan bagi pemberi pinjaman tertarik untuk meminjamkan dana kepada suatu perusahaan yang berhasil yang berjalan seperti apa yang diharapkan.

Perusahaan yang memiliki ROE rendah akan terklasifikasikan sebagai perusahaan yang kurang baik dalam menghasilkan *incomenya*. Sebaliknya semakin besar ROE maka semakin baik asumsi kinerja perusahaan dari sisi pengelolaan ekuitasnya.

2.3 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Rancangan hipotesis penelitian ini untuk membuktikan apakah mekanisme *good corporate governance* memiliki hubungan dengan kinerja perusahaan. Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu diatas, maka penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut :

2.3.1 Komposisi Dewan Komisaris Independen terhadap Kinerja Perusahaan

Proporsi dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan atau komisaris independen juga mempengaruhi kinerja perusahaan yang bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Semakin tinggi perwakilan dari *outsider director* (komisaris independen), maka semakin tinggi independensi dan efektivitas *corporate board* sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan (Cahyani, 2009).

Arifani (2013) mengemukakan bahwa komisaris independen mempunyai pengaruh positif secara signifikan terhadap ROE. Hasil ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rosyada (2012), Midiastuty dan Machfoedz (2003). Komisaris independen dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Dalton dan Daily (1994) menjelaskan bahwa hubungan antara anggota dewan komisaris dengan kinerja serta nilai perusahaan didukung oleh perspektif fungsi *service* dan kontrol yang dapat diberikan oleh dewan komisaris.

Sulasmiyati, dkk. (2016) juga mengemukakan bahwa dewan komisaris independen secara simultan berpengaruh terhadap ROE. Artinya, sistem tata kelola perusahaan yang baik mampu mempengaruhi besar kecilnya profitabilitas perusahaan. Berdasarkan uraian diatas serta mengacu pada penelitian sebelumnya maka dapat dirumuskan :

H1 : Mekanisme good corporate governance dengan proksi komposisi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.

2.3.2 Komite Audit terhadap Kinerja Perusahaan

Komite audit ditempatkan sebagai mekanisme pengawasan antara manajemen dengan pihak eksternal, sehingga komite audit dipandang dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui pengawasan tersebut. Semakin banyak komposisi komite audit maka kinerja keuangan akan terawasi dengan baik sehingga kinerja

akan meningkat. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Arifani (2013) yang menemukan pengaruh positif komite audit independen terhadap kinerja keuangan.

Sam'ani (2008) juga mengatakan bahwa komite audit mempunyai peran yang penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya good corporate governance. Dengan berjalannya fungsi komite audit secara efektif, maka control terhadap perusahaan akan lebih baik, sehingga konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri dapat diminimalisasi.

Berdasarkan uraian diatas serta mengacu pada penelitian sebelumnya maka dapat dirumuskan :

H2 : Mekanisme good corporate governance dengan proksi komite audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.

2.3.3 Ukuran Dewan Direksi terhadap Kinerja Perusahaan

Board of Management (dewan direksi) adalah anggota dewan yang bertanggung jawab terhadap kinerja perusahaan dan menjalankan manajemen perusahaan. Menggambarkan jumlah anggota dewan direksi, diukur dengan mengetahui berapa banyak jumlah anggota dewan direksi dalam suatu perusahaan (Murwaningsari, 2007).

Penelitian yang dilakukan oleh (Rafriny, 2012) menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Setiap peningkatan ukuran dewan direksi akan memberikan manfaat bagi perusahaan karena terciptanya jaringan dengan pihak luar perusahaan dan menjamin adanya ketersediaan sumber daya sehingga akan menaikkan kinerja perusahaan. Berdasarkan uraian diatas serta mengacu pada penelitian sebelumnya maka dapat dirumuskan :

H3 : Mekanisme good corporate governance dengan proksi ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.

2.3.4 Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Perusahaan

Kepemilikan institusional (INSTOWN) mempunyai pengaruh terhadap kinerja. Prosentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen. Kepemilikan saham yang terpusat dalam satu kelompok atau satu keluarga, dapat menjadi salah satu penyebab lemahnya posisi dewan komisaris, karena pengangkatan posisi anggota dewan komisaris diberikan sebagai rasa penghargaan semata maupun berdasarkan hubungan keluarga atau kenalan dekat.

Machmud dan Djakman (2008) mengatakan bahwa struktur kepemilikan yang terkonsentrasi oleh institusi akan memudahkan pengendalian terhadap perusahaan, sehingga akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan. Semakin tinggi kepemilikan institusional semakin baik kinerja perusahaan, mempunyai kemampuan untuk mengontrol kinerja perusahaan sehingga semakin

hati-hati manajemen dalam menjalankan perusahaan. Kepemilikan institusional bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan pada umumnya dan manajer pengelola perusahaan pada khususnya.

Berdasarkan penelitian Puniyasa & Triaryati (2016), menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan (*Return on Equity*) pada perusahaan yang masuk indeks CGPI. Hal ini dilatarbelakangi oleh kepemilikan institusional memiliki risiko yang tinggi. Risiko yang tinggi ini timbul sebagai akibat dari penempatan sejumlah dana yang besar pada perusahaan yang bersangkutan, sehingga pemilik institusi cenderung bertindak demi kepentingannya saja. Pemilik institusional cenderung mengorbankan kepentingan minoritas dan membuat arah penentuan kebijakan perusahaan tidak seimbang yang akhirnya hanya menguntungkan pemegang mayoritas (Indarti, 2013).

Namun penelitian yang dilakukan Arifani (2013) menyatakan hal yang berbeda, bahwa kepemilikan institusional mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan. Dengan terlaksananya fungsi pengawasan oleh pihak institusional melalui kepemilikan sahamnya, maka kinerja manajemen akan semakin terawasi dan dapat meminimalisasi tindak kecurangan yang dapat dilakukan oleh manajemen sehingga kinerja keuangan perusahaan dapat meningkat. Berdasarkan uraian tersebut diatas serta mengacu pada penelitian sebelumnya maka dapat dirumuskan :

H4 : Mekanisme Good corporate governance dengan proksi Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.

2.3.5 Kepemilikan Manajerial terhadap Kinerja Perusahaan

Kepemilikan saham manajerial adalah proporsi saham biasa yang dimiliki oleh para manajemen, yang dapat diukur dari presentase saham biasa yang dimiliki oleh pihak manajemen yang secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan (Arifani, 2013).

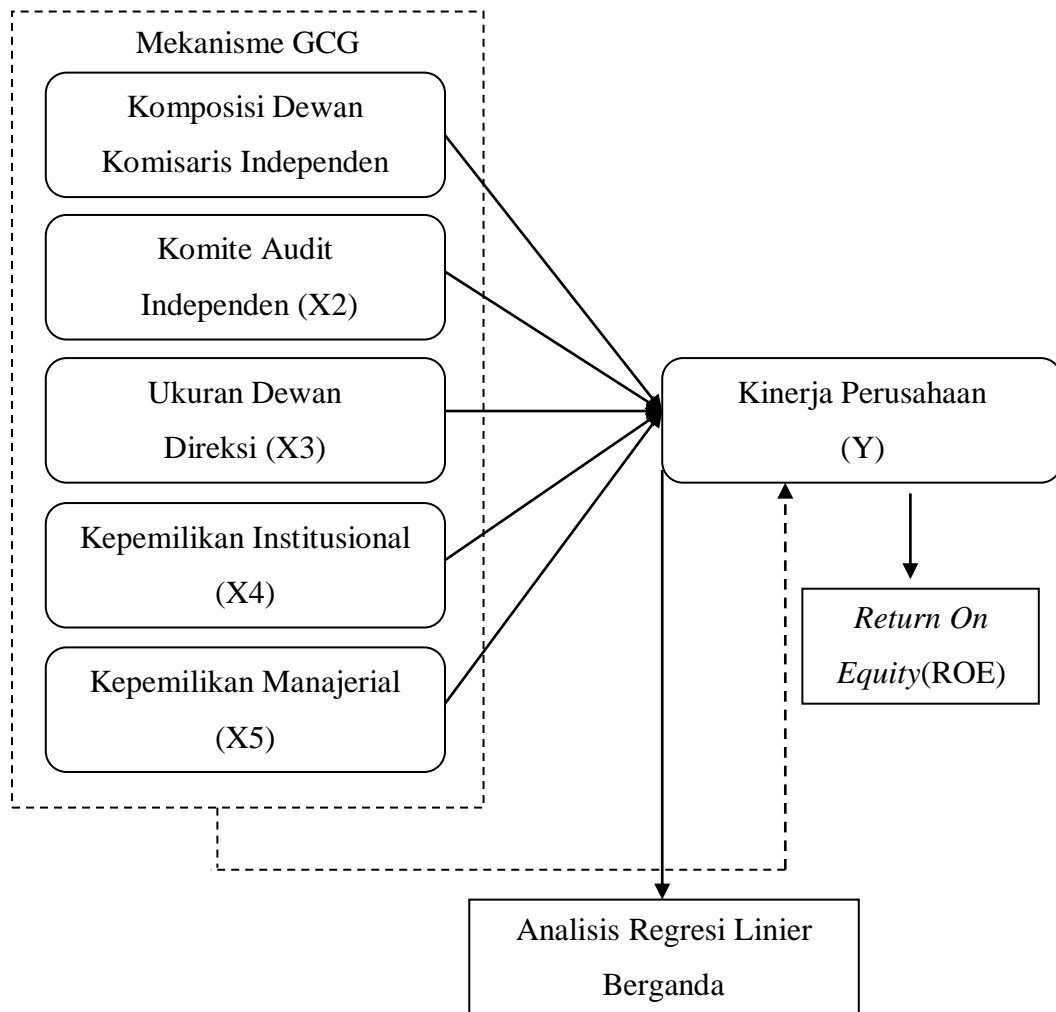
Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Rafriny (2012) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Puniyasa dan Triaryati (2016) juga menyatakan bahwa secara parsial kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Besarnya kepemilikan saham manajerial mengindikasikan kesamaan kepentingan antara manajemen dengan *shareholders* sehingga membuat kinerja keuangan perusahaan semakin baik.

Kepemilikan saham manajerial dapat dilakukan sebagai bentuk kompensasi bagi manajemen untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Untuk mendapatkan kompensasi tersebut, pihak manajemen akan berusaha secara maksimal untuk mengelola aset perusahaan secara efektif. Kompensasi yang diterima biasanya berupa kepemilikan saham. Setelah kepemilikan saham manajerial semakin tinggi, maka manajemen akan berusaha mempertahankan kekayaan perusahaan, yang salah satu didalamnya terdapat kepemilikan saham oleh pihak manajemen. Berdasarkan uraian tersebut diatas serta mengacu pada penelitian sebelumnya maka dapat dirumuskan :

H5 : Mekanisme Good corporate governance dengan proksi Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.

2.4 Rerangka Konseptual

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan, rerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1
Rerangka Konseptual

Dalam alur kerangka konseptual tersebut terdapat lima variabel bebas yaitu : X1 Komposisi Dewan Komisaris Independen, X2 Komite Audit Independen, X3 Ukuran Dewan Komisaris, X4 Kepemilikan Institusional dan X5 Kepemilikan Manajerial serta satu variabel terikat yaitu kinerja perusahaan Y. Untuk mencari apakah terdapat pengaruh antar variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).

Semakin tinggi komposisi dewan komisaris independen, menyebabkan ketatnya pengawasan terhadap manajemen, sehingga manajemen akan lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilakukan. Hal ini akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

Dengan adanya komite audit yang semakin banyak maka pengawasan antara manajemen dengan pihak eksternal akan meningkat, sehingga konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri dapat diminimalisasi. Dalam hal ini komite audit dipandang dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui pengawasan tersebut.

Peningkatan ukuran dewan direksi akan memberikan manfaat bagi perusahaan karena terciptanya jaringan dengan pihak luar perusahaan dan menjamin adanya ketersediaan sumber daya. Dengan demikian efisiensi dan efektivitas perusahaan akan meningkat, tujuan perusahaan akan tercapai dan terhindar dari benturan kepentingan antara perusahaan dengan kepentingan pribadi, sehingga kinerja perusahaan akan meningkat.

Besarnya tingkat kepemilikan institusional akan membantu menekan potensi kecurangan dalam perusahaan. Adanya kepemilikan institusional dapat memantau

perkembangan investasinya sehingga tingkat pengendalian terhadap manajemen sangat tinggi.

Dengan memperbesar kepemilikan saham oleh manajemen dapat meningkatkan proporsi saham yang dimiliki manajer sehingga akan menurunkan kecenderungan manajer untuk melakukan tindakan yang berlebihan karena akan merugikan dirinya sendiri. Semakin besar kepemilikan saham oleh manajer dalam perusahaan semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan kinerja perusahaan.